

**STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BATAM**

**Laporan Keuangan Tahunan Untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2024**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Penyusunan Laporan Keuangan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Batam, 31 Desember 2024

Kepala,

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si
NIP. 19780123200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan	vii
Pernyataan Tanggung jawab	x
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi	15
C. Penjelasan Atas-Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan Atas pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	42
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023	21
Tabel 2 Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023	21
Tabel 3 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023	22
Tabel 4 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	22
Tabel 5 Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023	22
Tabel 6 Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023	23
Tabel 7 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek	23
Tabel 8 Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023	24
Tabel 9 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023	24
Tabel 10 Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023	24
Tabel 11 Rincian Mutasi Tanah	25
Tabel 12 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	25
Tabel 13 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024	26
Tabel 14 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
Tabel 15 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	27
Tabel 16 Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023	27
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
Tabel 18 Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023	28
Tabel 19 Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023	29
Tabel 20 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2024	29
Tabel 21 Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024	29
Tabel 22 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	30
Tabel 23 Rincian Mutasi Aset Lain-lain	31
Tabel 24 Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024	31
Tabel 25 Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2024	31
Tabel 26 Perbandingan Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	32
Tabel 27 Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024	32
Tabel 28 Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023	32
Tabel 29 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	33
Tabel 30 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	33
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	34
Tabel 32 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	35
Tabel 33 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	36

Tabel 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	
Tabel 35 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2024 dan 2023	37
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023	37
Tabel 37 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 202	38
Tabel 38 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2024 dan 2023	38
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023	39
Tabel 40 Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024	40
Tabel 41 Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024	40
Tabel 42 Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024	40
Tabel 43 Transaksi Antar Entitas TA 2024	41
Tabel 44 Transaksi Antar Entitas TA 2024	41
Tabel 45 Transaksi Antar Entitas TA 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laporan Realisasi Anggaran	1
Gambar 2 Neraca	4
Gambar 3 Laporan Operasional	5
Gambar 4 Laporan Perubahan Ekuitas	6

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-LP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
BAS	: Bagan Akun Standar
KUN	: Kas Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Catatan	B.2.1.	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah

BELANJA NEGARA

Catatan	B.2.2	Belanja Negara
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat

NERACA

ASET

		Aset Lancar
Catatan	C.2.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan
Catatan	C.2.3	Kas Pada Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.4	Piutang Pajak
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak
Catatan	C.2.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Catatan	C.2.7	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Catatan	C.2.8	Uang Muka Belanja
Catatan	C.2.9	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.10	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.11	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan

		Umum
Catatan	C.2.12	Piutang Lainnya
Catatan	C.2.13	Persediaan
Catatan	C.2.14	Persediaan Badan Layanan Umum
		Inventasi Jangka Panjang
Catatan	C.2.15	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.16	Investasi Permanen Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.18	Aset Tetap
Catatan	C.2.19	Aset Lainnya
KEWAJIBAN		
		Kewajiban Jangka Pendek
Catatan	C.2.20	Utang Kepada Pihak Ketiga
Catatan	C.2.21	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Catatan	C.2.23	Uang Muka dari Rekening Khusus
Catatan	C.2.24	Uang Muka dari BUN
Catatan	C.2.25	Uang Muka dari KPPN
Catatan	C.2.26	Pendapatan Yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.27	Utang Jangka Pendek Lainnya
EKUITAS		
Catatan	C.2.28	Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
		Ekuitas Dana Lancar
Catatan	C.2.29	Dana Lancar Lainnya
Catatan	C.2.30	Cadangan Piutang
Catatan	C.2.31	Cadangan Persediaan
Catatan	C.2.32	Pendapatan Yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.33	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
		Ekuitas Dana Investasi
Catatan	C.2.34	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Catatan	C.2.35	Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Catatan

C.2.36

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Catatan

C.2.37

Dana Yang Harus Disediakan Untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi SKIPM Provinsi Kepulauan Riau tingkat wilayah selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Batam, 31 Desember 2024

Kepala,

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si
N.P. 1978012320031 2 1001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor SKIPM Batam Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 584,964,099 atau mencapai 82 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.710.210.000 Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 3.854.537.635 atau mencapai 92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.192.886.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 10,713,848,482 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 33,023,220; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 10.680.825.262; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 41,168,000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 29,688,198 dan Rp. 10,684,160,284.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 572,205,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 4,232,506,174 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.3.660.301.174. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. (531.404) dan Rp. 3.660.832.578 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 3.660.832.578

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 11,179,626,972 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (3.660.832.578) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 3,386,000 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 3.161.979.890 ,kenaikan/penurunan ekuitas Rp(495.466.688) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 10,684.160.284.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Anggaran	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	710,210,000	584.964.099	82	781.933.100
Jumlah Pendapatan		710,210,000	584.964.009	82	781.993,100
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.666.746.000	1.652.361.023	92	3.076.088.800
Belanja Barang	B.4	2.526.140.000	2.202.176.212	99	3.081.388.817
Belanja Modal	B.5	-	-	-	57,993,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		4,192,886,000	3,854,537,635	92	6,215,470,697

Gambar.1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
NERACA
PER 30 September 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian		2024	2023
ASET	Catatan		
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.1.7	0	0
Jumlah piutang jangka panjang	C.1.8	0	0
Persediaan	C.1.9	33.023.200	124,750,333
JUMLAH ASET LANCAR		33.023.200.	124,750,333
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	8,525,430,000.	8,525,430,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.691.658.725.	8,389,718,428
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1,962,797,000.	1,962,797,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1,520,089,000.	1,520,089,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	41,168,000.	41,168,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0.	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.7	(7.060.317.463.)	(9,366,125,289)
JUMLAH ASET TETAP		10,680,825,262	11,073,077,139
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-lain	C.3.1	0.	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2	0.	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		10.713.848.482	11.197.827.472
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	29.688.198.	18,200,500
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0	
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.4	29.688.198	18,200,500
JUMLAH KEWAJIBAN	C.4.5	29.688.198	18,200,500
EKUITAS			
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5.1	10.684.160.284	11,179,626,972
JUMLAH EKUITAS		10.684.160.284	11,179,626,972
JUMLAH EKUITAS		10.684.160.284	11,179,626,972
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.713.848.482	11,197,827,472

Gambar.2

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL		0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL		0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	572.205.000.	500,205,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		572.205.000.	500,205,000
Jumlah Pendapatan		572.205.000	500,205,000.
BEBAN OPERASIONAL	D.2	0.	0.
Beban Pegawai	D.3	1.652.361.023	3.076.088.880
Beban Persediaan	D.4	165.630.804.	272.914.399
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.410.833.858	1.795.184.615
Beban Pemeliharaan	D.6	322.512.495.	440.113.905
Beban Perjalanan Dinas	D.7	409.240.641.	649.515.460.
Beban Penyusutan dan Amortisasi		271,927,353	604.118.651
JUMLAH BEBAN		(4.232.506.174).	(6.837.935.910).
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.660.301.174	6.065.380.910
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(5.318.904)	(21,121,900).
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		(7.971.599)	(9,378,100).
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(13.290.503)	(30,500,000).
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,787,500	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,787,500	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	11,907,499	(21,121,900)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,580,123,133)	(4.300.806.660)
POS LUAR BIASA	D.9	0.	0.
Beban Luar Biasa		0.	0.
POS LUAR BIASA		0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2,580,123,133)	(4.300.806.660)

Gambar.3

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	11,179,626,972	11,795,267,935
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(2,580,123,133)	(4.300.806.660)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0.	0.
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	3,386,000	12.887.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.5	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6	0.	0.
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	0	12.887.000.
SELISIH REVALUASI ASET	E.8	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.9	3,386,000	0.
LAIN-LAIN	E.10	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	2,121,226,983.	3.769.109.198.
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.12	(455,510,150)	(518,810,462)
EKUITAS AKHIR	E.13	10,724,116,822	11,276,457,473

Gambar 4

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum entitas
dan rencana strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan M.Nahar No.01 Batam, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, upaya perlindungan sumber daya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam berkomitmen dengan :

VISI:

“ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman ,Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

“Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”.

TUGAS :

“Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu”

FUNGSI :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari

- dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 7. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 8. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 9. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 10. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
 11. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

TUJUAN :

“Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Batam;

9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku	50 tahun

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
PosLaporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rincian DIPA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	710.210.000	710.210.000
Jumlah Pendapatan	710.210.000	710.210.000
Belanja		
Belanja Pegawai	1,678,860,000	1,678,860,000
Belanja Barang	2,321,140,000.	2,321,140,000.
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.000.0000	4.000.0000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp543,232,499

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp543,232,499 atau mencapai 76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp710.210.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup SKIPM Batam terdiri dari Pendapatan dari PNB, Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024
(dalam Rupiah)

	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan		
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0.	0.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.	7,119,999
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0.	7,119,999
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		

425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	675,210,000.	522,025,000.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	675,210,000.	522,025,000.
4253 425332	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	35.000.000	9,300,000.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	35.000.000	9,300,000.
4259 425911 425912	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0. 0.	0. 4,787,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0.	0.
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	710,210,000	543,232,499
	JUMLAH PENDAPATAN	710,210,000	543,232,499

(dalam Rupiah)

Realisasi Belanja
Rp. 2,664,686,607

Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 2,664,686,607 atau 67% dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.000.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,678,860,000	1,273,493,940.	76
Belanja Barang	2,321,140,000.	1,391,192,667.	60
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	4.000.0000	2,664,686,607	67
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	-	-	-
Jumlah	4.000.0000	2,664,686,607.	67

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan Belanja Barang untuk mendukung operasional perkantoran dan pelayanan serta pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik. Tahun 2024 jumlah anggaran untuk belanja modal tidak dianggarkan.

Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	1,273,493,940	2,214,571,861.	7,81
Belanja Barang	1,391,192,667	1,994,269,437	15,56

Belanja Modal	0	57,993,000..	73,47
Belanja Bantuan Sosial	0	0	42,86
Jumlah	2,664,686,607	4,266,834,298	69.90

*Belanja Pegawai
Rp.1,273,493,940*

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,273,493,940 dan Rp. 3,055,081,000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 7,81 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penerimaan pegawai Non PNS dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor. Adanya pemisahan organisasi yang menyebabkan beberapa pegawai yang mendapat jabatan pengendali hama dan penyakit ikan dipindahkan untuk bergabung ke instansi Badan Karantina Indonesia

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	391.110.8000	30.911.400	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	34,765,400	394.1111.000	0
Belanja Honorarium/Vakasi	538,818,250	606,343,007	0
Belanja Lembur	78,829,000	71,797,000	0
Belanja Uang makan	49.825.000	75,901,000	0
Jumlah Belanja Kotor	1,273,493,940	1,506,541,086	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	14	0
Jumlah Belanja	1,273,493,940	1,506,541,072	0

*Belanja Barang
Rp, 1,391,192,667*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,391,192,667 dan Rp1,994,269,437.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	484,150,610	0	0
Belanja Barang Non Operasional	48,895,300	0	0
Belanja Persediaan	53,408,400	0	0
Belanja Jasa	373,011,060	0	0
Belanja Pemeliharaan	189,712,800	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	242,014,497	0	0
Jumlah Belanja Kotor	1,391,192,667		0
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	1,391,192,667	0	0

Belanja Modal

Rp. 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 57,993,000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dikarenakan anggaran untuk belanja modal tidak dianggarkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	57.993.000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0		

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Belanja Modal Tanah Rp.0

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.0. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Printer	0		
Server			
Komputer Tablet	0		
Laptop	0		
Scanner			
Jumlah Belanja Kotor	0		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0		

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Gedung Kantor			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
--------	----------------	----------------	---

Belanja Modal Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

Belanja Modal Lainnya Rp.0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Software			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar SKIPM Batam 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 103,565,328 dan Rp. 124,750,333.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

Aset Lancar Rp. 103,565,328

dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.60.000.000*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 1
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	60.000.000	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2024 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 2
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp.0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	SKIPM Batam	0	-
		0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	SKIPM Batam	0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp.0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Piutang Pajak			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

*Beban Dibayar di
Muka
Rp.0*

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2024 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah SKIPM Batam per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima SKIPM Batam per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah		

Persediaan Rp 43,565,328

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 43,565,328 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	23,152,758	
Barang untuk Pemeliharaan	9,000	
Suku Cadang	0	
Bahan baku	20,403,570	
Jumlah	43.565.328	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Rp. 10,790,609,283

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap SKIPM Batam per 30 September 2024 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 10,790,609,283 dan Rp. 11,073,077,139.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas. Aset Tetap pada SKIPM Batam berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp.15.205.753.697

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.15.205.753.697 dan Rp.15.205.753.697

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	15.205.753.697
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
Saldo Per 30 September 2023	15.205.753.697
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	-
Nilai Buku Per 30 September 2023	15.205.753.697

Peralatan
dan Mesin
Rp7,960,913,164

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin SKIPM Batam per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 7,960,913,164 dan Rp. 8,389,718,428.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	8,389,718,428
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	1,526,375
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Penghapusan	0
Saldo Per 30 September 2023	8.391.244.803
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(7,429,133,536)
Nilai Buku Per 30 September 2023	7.960.913.164

Mutasi tambah tidak ada

Transfer Masuk berupa sertifikat kesehatan karantina dari Balai Besar Jakarta I Rp. 1.526.375

Reklasifikasi Masuk berupa Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya.

Koreksi Tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan Mutasi kurang:

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,962,797,000 dan Rp7.043.807.862.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1,962,797,000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	(0)
Saldo Per 30 September 2023	1,962,797,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(342,233,141)
Nilai Buku Per 30 September 2023	1,962,797,000

Mutasi tambah tidak ada dan mutasi kurang tidak ada Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan Bangunan
Rp1,962,797,000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.520.089.000 dan Rp.1.611.417.460 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.520.089.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 30 September 2023	1.520.089.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(1.448.421.204)
Nilai Buku Per 30 September 2023	1.520.089.000

Mutasi tambah tidak ada Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.1.520.089.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

Aset Tetap Lainnya
Rp.
431,555,264

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 431,555,264 dan Rp. 431,555,264 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 30 September 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(0)
Nilai Buku Per 30 September 2023	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan rencana design pembangunan ruang arsip mushala.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.					
	Jumlah				

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (9,219,787,881)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (9,219,787,881) dan Rp. (9,366,125,289) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan	7,960,913,164	7,429,133,536	2.441.154.611

	dan Mesin			
2.	Gedung dan Bangunan	1,962,797,000	342,233,141	6.151.503.849
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.520.089.000	1.448.421.204	149.268.099
4.	Aset Tetap Lainnya	431,555,264	431,555,264	0
	Jumlah	11.874.539.428	8.944.859.001	2.929.680.427

Piutang Jangka Panjang
Rp.0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah SKIPM Kepulauan Riau per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada SKIPM Batam merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp.0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	SKIPM Batam	0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	SKIPM Batam	0	0
			0
	Jumlah	0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp.0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang SKIPM Batam per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2024*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

*Aset Lainnya
Rp.0*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah SKIPM **Batam** per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada SKIPM Batam terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel 21
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Jumlah	

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada SKIPM Batam adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023		0
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Saldo Per 30 September 2024		0
Amortisasi s.d. 30 September 2024		0)
Nilai Buku Per 30 September 2024		0

Mutasi tambah tidak ada

Aset Lain-Lain
Rp.0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 September 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.3.400.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022		3.400.000
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		0
Mutasi Kurang:		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan		0
Penghapusan BMN		3.400.000
Saldo Per 30 September 2023		0
Amortisasi s.d. 30 September 2023		(0)
Nilai Buku Per 30 September 2023		0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp. 183,348,292

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek SKIPM Batam per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 183,348,292 dan Rp18.200.500.

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp.60.000.000

Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup SKIPM Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	SKIPM Batam	60.000.000
2.	BKIPM Tj.Pinang	0
	Jumlah	0

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 119,228,292

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 119,228,292 dan Rp. 18,200,500. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor SKIPM Batam per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Total		

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0*

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas Rp.
11,795,267,935

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11,795,267,935 dan Rp 12,538,178,514. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.543.232.499

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.543.232.499 dan Rpo. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 29

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7,119,999	0	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	522,025,000	0	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	9,300,000	0	
Pendapatan Lain-lain	4,787,500	0	
Jumlah	543,232,499	0	76.49

Pendapatan akrual pada berasal dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dan pendapatan lain-lain yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu dan pengembalian belanja barang tahun lalu.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,319,157,232 dan Rp-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	2.478.162.230	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	730.930.730	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	3.201.153.649	0	0
Beban Lembur	518.869.000	0	0

Beban Pegawai
Rp1,319,157,232

Beban Uang Makan	460.333.000	0	0
Jumlah Beban	7,389,448,609.	0	0

Beban Persediaan Rp570.241.200
0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.570.241.200 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	251.534.120	-	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	19.103.670	-	0
Beban Persediaan suku cadang	50.635.300	-	0
Beban Persediaan bahan baku	231.099.390	-	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	17.868.720	-	0
Jumlah Beban	570.241.200	-	0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Baran dan Jasa Rp3,534,050,223.

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,534,050,223. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban barang operasional penanganan pandemic Covid-19, beban jasa penanganan pandemic Covid-19 seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban listrik, langganan daya dan jasa serta beban langganan air, disebabkan adanya efisiensi pola kerja pegawai yaitu penghematan listrik dan air jika tidak digunakan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan dan administrasi kantor. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	179.3338.018	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	157.598.800	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	8.929.500	-	-
Beban Honor Operasional Satker	256.752.000	-	-
Beban Bahan	242.623.600	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	106.439.250	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.600.000	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	-	-
Beban Langganan Listrik	358.582.817	-	-
Beban Langganan Telepon	3.422.630	-	-
Beban Sewa	252.733.700	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	99.940.658	-	-
Beban Jasa Lainnya	186.375.000	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.528.000	-	-
Jumlah Beban	3,534,050,223.	-	-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp623,740,631.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan
Rp623,740,631.000

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.872.400	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	440.868.231	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	623,740,631.000	0	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas*
Rp.737,229,727.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.737,229,727.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.714.054.73	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.415.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	387.409.254	-	-
Jumlah Beban	737,229,727.000	-	-

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat*
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Jumlah Beban	0		

Beban

Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1,553,016,544.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,553,016,544.000 dan Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.377.084.507	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	169.771.210	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,160,827.000	-	-
Jumlah Penyusutan	1,553,016,544.00	-	-
Beban Amortisasi Software	0	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	1,553,016,544.00	0	0

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional Rp.0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari

Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Beban			

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 11,179,626,972

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 11,179,626,972 dan Rp 11,795,267,935

Defisit LO
Rp. 2,580,123,133

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp. (2,580,123,133) dan Rp. (4,300,806,660) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 masing-masing

adalah sebesar Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp.0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Bogor.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp. 3.386.300

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.386.300 dan Rp.0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	3.386.300
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp.0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.121.226.983

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar

Rp. 2,121,226,983 dan Rp. . 3.769.109.198

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 43

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	543,232,499
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,664,686,607
Transfer Masuk	1,526,375
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(2.121.226.983)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 September 2024, DDEL sebesar Rp. 543,232,499 sedangkan DKEL sebesar Rp509.583.100.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 1.526.375 terdiri dari:

Tabel 44

Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Sertifikat	Balai BKIPM Jakarta I	1,526,375
Jumlah			1,526,375

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp. 1,753,500.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 untuk tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	SKIPM Batam	-	0
		-	0
		-	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp.
10,724,116,822.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 10,724,116,822. dan Rp. 11,179,626,972

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Sepanjang Janaurri sampai dengan Desember 2024, SKIPM Batam telah melakukan revisi anggaran sebanyak 15 revisi. Temuan ITJEN terkait pengurusan IMB sudah ditindaklanjuti dan sudah diproses

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
UTAMA DAN TAMBAHAN